

BABI

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul ini berawal dari keikutsertaan penulis dalam FKMHII MUN (Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional Se-Indonesia Model United Nations) Korwil IV sebagai delegasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dimana topik yang dibahas ialah mengenai *Millenium Development Goals* (MDGs). Alasan lainnya berangkat pada besarnya minat penulisterhadap isu-isu pembangunan dalam hal ini kajian mengenai MDGs dalam fenomena hubungan internasional kontemporer. MDGs sendiri merupakan suatu deklarasi atau kesepakatan para kepala negara dan perwakilan 189 negara Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengenai kemiskinan, keamanan, perdamaian, pembangunan dan hak asasi. Disamping itu pula penulis melihat momentum yang pas dalam mengkaji MDGs dimana program MDGs ini tidak lama lagi harus segera terpenuhi yakni ditahun 2015 dari awal kesepakatan pada bulan September 2000 pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium PBB di New York. Selama dua periode kepemimpinan SBY, apa yang telah dicapai akan dijadikan tolak ukur dalam pencapaian pembangunan MDGs. Oleh sebab itu tentu banyak kontribusi SBY yang telah dilakukan guna mencapai target-target MDGs.

Selain itu, pembangunan merupakan suatu hal yang terpenting dalam suatu negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat

terutama di negara-negara sedang berkembang. Karena melihat dari karakteristik negara sedang berkembang yakni ditandai dengan pendapatan yang rendah serta lemah dalam hubungan perdagangan¹. Maka dari itu perlu untuk akan adanya suatu peningkatan, salah satu upaya peningkatan ialah melalui kerjasama global.

Indonesia salah satu dari negara yang termasuk kedalam jajaran negara sedang berkembang yang dalam hal ini masih berada pada tingkat pendapatan yang rendah. Oleh sebab itu Indonesia masih sangat butuh akan adanya suatu pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Alasan lain dari pemilihan judul ini adalah karena sejauh pengetahuan penulis, tulisan yang membahas mengenai MDGs sudah lumayan banyak akan tetapi untuk pada poin kedelapan pada pencapaian MDGs masih sangat sedikit, yakni dalam membangun kerjasama global untuk pembangunan. Penulis sendiri menginginkan untuk skripsi ini menjadi skripsi yang sistematis, struktur, dan masif. Masif disini dalam artian skripsi ini bukan hanya bermanfaat bagi penulis saja, namun bermanfaat bagi masyarakat luas.

Oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengangkat **Upaya Indonesia Dalam Mengembangkan Kemitraan Global Dalam Pencapaian Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono** menjadi judul skripsi ini.

B. Penegasan Judul

¹ Wahyuni Kartikasari, Materi Kuliah Masalah Negara Berkembang. Slide 4. Penulis merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Fokus judul dari penelitian ini adalah mengenai kemitraan global dalam pencapaian pembangunan MDGs. Sebelum kepada pembahasan selanjutnya, penulis akan membahas apa itu kemitraan global.

Kemitraan global adalah upaya untuk membangun kerjasama antara beberapa pihak dalam lingkup yang besar². Melalui bentuk kerjasama ini, Indonesia diharapkan mampu menjalin hubungan baik yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak dalam negeri maupun luar negeri, pihak swasta maupun pihak pemerintah. Kemitraan global merupakan salah satu target MDGs “mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan”, maka bentuk kerjasama ini diharapkan mampu menjadi lokomotif utama dalam upaya pembangunan dalam negeri pada khususnya, dan secara global pada umumnya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah guna penulis dapat mengetahui langkah-langkah Indonesia pada masa pemerintahan SBY dalam membangun kemitraan global untuk mencapai pembangunan MDGs yang harus segera terpenuhi pada tahun 2015 nanti.

D. Latar Belakang Masalah

Permasalahan pokok yang berada pada negara sedang berkembang adalah masalah pembangunan, karena selain *nation building* serta *state building* yang dilakukan pasca kemerdekaan suatu negara perlu adanya suatu pembangunan lain yakni peningkatan pada pertumbuhan ekonominya. Karena perkembangan

² Katulistiwa 6, dalam “*Membangun Kerjasama Global Melalui Ekonomi Kreatif*” (Diakses pada 24 Desember 2014) tersedia di <http://www.katulistiwa-febub.com/2013/03/8-mengembangkan-kemitraan-global.html?m=1>

pembangunan negara tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai suatu negara tersebut.

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah menempatkan perhatian yang besar terhadap pembangunan terutama pertumbuhan ekonomi secara terus menerus. Pada dasarnya pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan dan peningkatan pendapatan dengan menciptakan lapangan pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi yang telah berhasil diwujudkan secara nyata juga telah menyebabkan turunnya jumlah penduduk miskin. Namun, masalah kemiskinan masih perlu dituntaskan lagi mengingat jumlah penduduk yang saat ini masih termasuk kedalam kategori penduduk miskin yang cukup besar. Selain pembangunan dengan alasan prikemanusiaan, mengatasi masalah kemiskinan juga merupakan usaha untuk menghindari biaya pembangunan yang besar dimasa yang akan datang. Karena masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah pembangunan yang menyangkut berbagai aspek, baik ekonomi, struktural, maupun budaya³.

Masalah kemiskinan, saat ini merupakan masalah yang sudah menjadi bagian permasalahan dunia. Karena kemiskinan telah menjadi masalah yang membutuhkan penyelesaian secara signifikan dan harus segera ditangani. Oleh sebab itu negara-negara didunia bersama-sama ingin memberantas kemiskinan dengan bekerjasama melalui berbagai jalan salah satunya melalui pengembangan

³ Ganesha, dalam “*Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan*”. Vol. V. No. 10. Mei 2004

kerjasama global. Perwujudan dari kepedulian atas dunia terhadap kemiskinan adalah dengan diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan September 2000 yang diikuti oleh kepala negara dan perwakilan negara dari 189 negara anggota PBB yang kemudian mereka mengadopsi Deklarasi Millenium. Deklarasi tersebut merupakan komitmen para pemimpin dunia yang sebelumnya tidak pernah ada untuk menangani isu tentang perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi dan kebebasan fundamental dalam satu paket.

MDGs merupakan satu set tujuan pembangunan dimana terdiri dari delapan tujuan yang dijadikan indikator proses pembangunan di negara-negara sedang berkembang terutama pada pengentasan kemiskinan. Kedelapan tujuan pembangunan ini harus dicapai pada tahun 2015, dimana delapan tujuan yang tergabung dalam MDGs ini adalah sebagai berikut⁴:

1. Menghapus kemiskinan dan kelaparan penduduk dunia

Pada tahun 2015, jumlah penduduk dunia yang mengkonsumsi kurang dari US\$ 1 setiap harinya harus bisa dikurangi sampai 50%. Pada tahun yang sama, kelaparan yang melanda penduduk dunia juga diharapkan dapat dihapuskan.

2. Mencapai level pendidikan dasar universal

⁴ UNMP, dalam *“Investing in Development : A Partical Plans to Achieve the Millenium Development Goals”*, 2005, hal. Xx.

Semua penduduk di dunia, khususnya anak-anak, laki-laki maupun perempuan, harus mendapatkan pendidikan dasar. Target tersebut harus dicapai pada tahun 2015.

3. Memberdayakan wanita dan mempromosikan kesetaraan gender

Kesenjangan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah antara laki-laki dan perempuan harus dihilangkan pada tahun 2015.

4. Mengurangi kematian anak

Mengurangi dua per tiga angka kematian balita, yang tercatat pada 1990, pada tahun 2015.

5. Memperbaiki kesehatan kandungan

Mengurangi tiga per empat angka kematian ibu yang sedang mengandung, yang tercatat pada 1990, pada tahun 2015

6. Memperbaiki tingkat kesehatan penduduk dunia

Menghentikan penyebaran HIV/AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit utama yang lain pada tahun 2015.

7. Menjaga keseimbangan lingkungan hidup global

Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan-kebijakan negara serta membangun kembali sumber daya alam yang telah hilang.

8. Membangun kerjasama global untuk pembangunan

Seluruh negara-negara di dunia harus berkomitmen untuk penyebaran demokrasi, *good governance*, dan pengurangan kemiskinan baik pada level nasional maupun level internasional.

Pada poin terakhir dari capaian target MDGs ialah membangun kerjasama global untuk pembangunan. Tujuan ini dimana negara-negara berkomitmen dengan melalui kerjasama global yang salah satu targetnya adalah pengurangan kemiskinan baik pada tingkat nasional maupun internasional. Dalam pemerintahan SBY baik periode I (2004-2009) maupun II (2009-2014), SBY berupaya untuk menjalin kerjasama global guna menurunkan tingkat kemiskinan baik di Indonesia sendiri maupun di tingkat internasional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen atas delapan target tersebut tentu berupaya untuk mengurangi setidaknya setengah dari jumlah penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan yang harus dicapai dalam target-target terpenting MDGs sebelum 2015.

Pada poin terakhir dari kedelapan poin MDGs ialah membangun kerjasama global untuk pembangunan, ini dimana semua negara harus berkomitmen dengan melalui kerjasama global yang salah satu targetnya adalah pengurangan kemiskinan baik pada tingkat nasional maupun internasional. Ditingkat nasional, saat deklarasi MDGs diluncurkan pada tahun 2000, jumlah penduduk miskin di

Indonesia mencapai 37,3 juta atau sekitar 19%⁵. Hingga pada tahun 2004 sejak pemilu nasional dan SBY terpilih sebagai Presiden persentase masyarakat miskin telah turun dari 19 persen (2000) ke 16,7 persen atau sekitar 36,1 juta penduduk miskin (2004) dan ditahun 2009 menurun menjadi 14,15 persen⁶. Sedangkan pada periode II (2009-2014) SBY menjabat sebagai presiden yakni survei pada bulan maret 2014 kemiskinan nasional telah dapat diturunkan hingga jumlah penduduk miskin sebesar 28,28 juta orang atau 11,25 persen dari 14,15% persen pada tahun 2009⁷.

Pada tahun 2006, dalam laporan “*A Future Within Reach*” di Asia Pasifik Indonesia menempati katagori terbawah bersama dengan Bangladesh, Filipina, Laos Mongolia, Papua Nugini, Pakistan⁸. Bahkan Indonesia dimasukkan kedalam kelompok negara dengan status semakin tertinggal, yaitu negara dengan skor negatif untuk indeks kemajuan dan indeks status terkini.

Sedangkan pada tingkat internasional, menurut laporan berjudul “*Capturing New Sources of Growth*”, kawasan Asia Timur dan Pasifik tumbuh sebesar 8,2 persen ditahun 2011 (4,3 persen, jika tidak memperhitungkan China) – turun

⁵ Gunawan Sumodiningrat, dalam “*MDGs dan Indonesia*” (Diakses pada 23-06-2014 Pukul : 1:08) tersedia di <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F6275/MDGs%20dan%20Indonesia-Kps.htm>

⁶ World Bank, dalam “*kemiskinan di Indonesia*” (Diakses pada 23-06-2014 Pukul : 1:16) tersedia di <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIA/INBAHASAEXTN/0,,contentMDK:22487425~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:447244,00.html>

⁷ VOA Indonesia, dalam “*BPS : Tingkat Kemiskinan Indonesia Menurun*” (diakses pada 28-09-2014 Pukul 23:11) tersedia di <http://www.voaindonesia.com/content/bps-tingkat-keliskinan-indonesia-menurun/1948483.html>

⁸ Digilib Ampel – Kumpulan Berita, dalam “*Indonesia Mundur Soal MDG*” (Diakses pada 23-06-2014 Pukul : 1:34) tersedia di <http://digilib-ampel.net/detail/detail.php?row=&tp=kliping&ktg=mdg&kode=4900>

drastis dari tingkat pertumbuhan tahun 2010 yang hampir mencapai 10 persen (7,0 persen tanpa China)⁹.Namunkinerja kawasan pada skala global masih tergolong luar biasa. Pada tahun 2011 misalnya, pertumbuhan di kawasan Asia Timur dan Pasifik berada pada kisaran 2 persen lebih tinggi dari negara berkembang di kawasan-kawasan lain. Tingkat kemiskinan pun terus menurun. Menurut Pamela Cox, Wakil Presiden Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, upaya-upaya untuk menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru harus lebih ditingkatkan¹⁰.

Dari data yang telah dipaparkan bahwasannya Indonesia sebagai negara yang tingkat kemiskinannya masih cukup tinggi walaupun rata-rata dari tahun ketahun terjadi penurunan dan bahkan diantara kawasan Asia Timur dan Pasifik mengalami hal yang sama. Ini kemudian bahwa dalam pencapaian MDGs perlu adanya integritas kemitraan seperti Indonesia dalam kawasan Asia Pasifik. Kareana pengembangan kemitraan global seperti ini cukup ampuh dalam melakukan suatu pembangunan terlebih pada pencapaian MDGs yang segera harus dipenuhi untuk tidak lama lagi pada tahun 2015.

E. Rumusan Masalah

Bagaimana langkah Indonesia pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengembangkan kemitraan global guna mencapai pembangunan *Millenium Development Goals (MDGs)*?

⁹ The World Bank, dalam *Staran Pers "Pertumbuhan Asia Timur dan Pasifik Tetap Kuat Namun Melambat"* (Diakses pada 23-06-2014 Pukul : 1:12) tersedia di <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2012/05/23/growth-in-developing-east-asia-and-pacific-is-strong-but-slowng>

¹⁰ *Ibid*

F. Kerangka Konseptual

Dalam menjelaskan fenomena ini, dibutuhkan kerangka berfikir untuk dapat membantu menjelaskan fenomena tersebut. Oleh sebab itu, penulis menggunakan konsep *soft power*, teori institusionalisme neoliberal dan *world system theory* dalam menjelaskannya.

1. Konsep *Soft Power*

Soft power merupakan kemampuan aktor politik dalam menarik negara lain untuk membentuk pandangan yang sesuai dengan ide-ide yang ingin mereka kembangkan melalui budaya, ide-ide politis, dan kebijakan luar negeri. Nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang dapat dibagi secara bersama, atau yang disebut dengan norma global. Norma global ini mencakup: liberalisme, pluralisme, dan otonomi. Pada prakteknya konsep *soft power* ini dikembangkan oleh Amerika Serikat sebagai lawan dari *hard power* yang lebih bertumpu kepada kekuatan militer dan ekonomi.

Menurut Joseph S Nye, *power* merupakan hal yang penting di dunia internasional. Dengan memiliki *power*, sebuah negara bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Joseph S Nye menjelaskan *power* sebagai “*the ability to influence the behavior of others to get the outcomes one wants*”. Lebih lanjut, Nye menjelaskan bahwa *power* tidak hanya berupa perintah dan paksaan. *Power* lebih dapat dirasakan ketika kita dapat membuat pihak lain melakukan hal yang

tidak diinginkan jika tidak dapat pengaruh dari kita. *Power* dapat berubah bahkan hilang ketika konteksnya berubah.¹¹

Konsep *soft power* pertama kali diciptakan pada tahun 1990 oleh Joseph Nye dalam bukunya yang berjudul: “*Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*”. Dalam bukunya, selanjutnya Nye juga memberikan definisi *soft power*. Menurut Nye:

“*Soft power is an indirect way to exercise power. A country may obtain the outcomes it wants in world politics because other countries want to follow it, admiring its values, emulating its example, aspiring to its level of prosperity and openness*”.¹²

Nye mendefinisikan *soft power* sebagai “*the ability to get what you want through attraction rather than through coercion or payments*”.¹³ *Soft power* berdasarkan pada kemampuan membentuk preferensi negara lain. *Soft power* tidak sama dengan pengaruh (*influence*). *Influence* bisa didapat dari ancaman dan pembayaran. Dalam arti luas, *soft power* dapat didefinisikan sebagai "elemen nasional suatu negara, yang mengarahkan negara melalui kemampuan untuk mendapatkan tujuan dengan pengaruh dan menarik perhatian negara-negara lain dengan memberikan citra positif".¹⁴ *Soft power* juga tidak hanya berupa

¹¹ Dewi Hertanty, dalam “*Scribd, Soft Power : Joseph Nye*” (Diakses pada 23-06-2014 Pukul : 2.13) tersedia di <http://id.scribd.com/doc/53416830/Soft-Power>

¹² Joseph Nye. 2002, dalam “*The Paradox of American Power: Why the world’ only Superpower Can’t Go It Alone*”. New York: Oxford University Press. Hal. 8

¹³ Mingjiang Li. 2009, dalam “*Soft Power: China’s Emerging Strategy in International Politics*”. United Kingdom: Lenginxtion Books. Hal. 3

¹⁴ Judit Trunkos. 2013, dalam “*What is soft power capability and how does it impact foreign policy?*” University of south Carolina

kemampuan untuk berargumentasi sehingga negaralain setuju dengan negara bersangkutan, tetapi juga kemampuan untuk menarik (*to attract*). Ketertarikan dapat membuat negara meniru negara lain. Jika negara memengaruhi negara lain tanpa ada ancaman atau syarat pertukaran di dalamnya, maka negara itu sedang menggunakan *soft power*.¹⁵

Mengenai konsep ini, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pun memiliki pandangan lain terhadap konsep ini dengan keadaan Indonesia dewasa ini yaitu, *soft power* menjadi sesuatu yang penting dalam dunia masa kini. *Soft power* diplomasi bisa memperkuat formula diplomasi, jadi merupakan wujud lain *the defender* terhadap apa yang di lakukan pada tingkat formal.

Soft power ini adalah sesuatu yang lain, konon lebih atraktif untuk dijalankan. Dan kembali bahwa semua ini untuk mencapai tujuan, singkatnya *soft power* adalah sesuatu yang khas yang di miliki suatu bangsa, dan Indonesia mampu menggunakan *soft power* dengan sebaik-baiknya karena Indonesia kaya akan *culture, ideas value, dan others matters* yang bisa bernilai jual dan menjadi *selling point* dalam diplomasi tingkat global¹⁶.

Soft power ini adalah konsep yang sangat relevan untuk Indonesia mengembangkan kerjasama globalnya, terlebih Indonesia memiliki faktor-faktor khas, seperti kedudukannya sebagai salah satu wakil regional dari asia tenggara, salah satu negara muslim terbesar di dunia, dan pengalaman dalam hal

¹⁵Dewi Hertanty, dalam “*Scribd, Soft Power : Joseph Nye*” (Diakses pada 23-06-2014 Pukul : 2.13) tersedia di <http://id.scribd.com/doc/53416830/Soft-Power>

¹⁶ Kementrian Luar Negeri, dalam Tabloid Diplomasi, Maret 2010, hal 4-5

perekonomian yang memungkinkan Indonesia untuk lebih dapat leluasa dalam melebarkan sayapnya untuk menjalin kerjasama global yang mampu membantu mencapai target MDGs yang akan berakhir pada 2015 mendatang. Karena konsep *soft power* ini merupakan tandingan dari *hard power* yang lebih menonjolkan kekuatan militernya, *soft power* ini lebih mengandalkan faktor-faktor yang negara punya untuk di jadikan *power* yang dapat mempengaruhi aktor-aktor politik seperti negara. Dan kedudukan Indonesia sangat cocok untuk mengaplikasikan konsep tersebut didalam menjalin suatu kerjasama global, karena Indonesia tidak memiliki kekuatan militer yang mumpuni dalam hal ini, Indonesia lebih pas dengan faktor-faktor dalam negerinya untuk lebih mempengaruhi negara-negara lain didalam suatu kerjasama global, sehingga dari konsep *soft power* itulah Indonesia dibawah pemerintahan SBY dapat mencapai kepentingannya, yakni pencapaian pada target pembangunan MDGs.

2. Teori Institusionalisme Neoliberal

Dalam kaca mata liberal bahwasanya negara bukanlah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional serta kepercayaan dalam menyelesaikan masalah bisa melalui institusi.

Menurut pandangan institusionalisme neoliberal, institusi internasional sangat berperan dalam mewujudkan kerjasama. Ini karena institusionalisme neoliberal melihat institusi bukan sebatas organisasi formal yang memiliki kantor utama dan staff terspesialisasi, tetapi lebih luas, seperti yang pernah diungkapkan Young dalam Keohane, sebagai "*recognized patterns of*

practice around which expectation converge"¹⁷. Pola-pola praktek tersebut dianggap signifikan karena mampu memengaruhi perilaku negara sehingga menginginkan adanya kerjasama. Ketika kepentingan yang sama telah ditemukan dan syarat-syarat kondisional telah terpenuhi, maka kerjasama bisa terjalin.

Kerjasama membutuhkan tindakan aktor-aktor yang terlibat dibawa menuju konformitas terhadap satu sama lain melalui proses negosiasi. Kerjasama dapat terjadi ketika aktor menyesuaikan perilakunya dengan preferensi aktor lain. Sementara itu dalam kerjasama memerlukan penyesuaian atau perubahan pola-pola perilaku serta bersifat sangat politis. Bukan berarti kerjasama mengindikasikan tidak adanya konflik. Kerjasama dapat mengandung unsur konflik dan merefleksikan sebagai upaya untuk mengatasi atau mencegah konflik¹⁸.

Institusi dapat mempengaruhi konteks aktor dalam memilih alternatif pilihan yang ada, kondisi ini karena institusi memiliki prinsip norma, prosedur, dan peraturan yang kemudian ini disebut sebagai rezim. Dimana ini dijadikan pedoman oleh aktor dalam bertindak¹⁹. Konstruksi dari rezim tersebutlah yang memfasilitasi terjalinnya kerjasama, sehingga tiap-tiap aktor yang terikat dalam rezim tersebut diharapkan berperilaku tertentu sesuai dengan apa yang disepakati bersama.

¹⁷ Robert O. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, (New Jersey: Princeton University Press, 1984), 8

¹⁸ *Ibid.* Hal 51-54

¹⁹ *Ibid.* Hal 84

Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, institusionalismeneoliberal ini melihat bahwasannya kerjasama ini terbentuk atas dua hal, yakni ; *mutual interest* dan *institusional degree*²⁰.

a. *Mutual Interest*

Suatu kerjasama terbentuk atas adanya *mutual interest* (kesamaan kepentingan)oleh sebab itu semakin tinggi kesamaan kepentingan diantara negara-negara, maka semakin tinggi pula kemungkinan negara-negara tersebut untuk bekerjasama.

b. *Institusional Degree*

Semakin banyak negara-negara akan bekerjasama tergabung didalam institusi-institusi tertentu, maka semakin tinggi pula kemungkinan bagi mereka untuk bekerjasama.Karena semakin banyak negara-negara bergaul dalam banyak komunitas, maka mereka akan semakin tahu karakter satu dengan yang lainnya sehingga *trust* (kepercayaan) akan terbentuk.

Selain itu ada beberapa alasan yang mendasari kepatuhan negara pada institusi, yaitu *legalliability*, *transaction cost*, dan *problems of uncertainty*²¹.

a. *Legal Liability*

Negara sangat menjunjung tinggi otonominya, sehingga hampir tidak mungkin untuk mendirikan institusi internasional yang menjalankan otoritas lebih

²⁰ Winner Agung Pribadi, Materi Kuliah Analisis Hubungan Internasional. “*Neoliberal Institutionalisme*”. Slide 4. Penulis merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

²¹Robert O. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*, (New Jersey: Princeton University Press, 1984), 88

tinggi daripada negara. Yang terjadi adalah institusi dibangun bukan untuk mengimplementasikan peraturan yang sentralistik, tetapi lebih kepada membangun “*mutual expectations*” yang stabil terkait pola perilaku pihak lain, dan mengembangkan hubungan kerja yang memungkinkan pihak-pihak terkait beradaptasi di situasi-situasi baru yang akan datang²².

b. *Transaction Cost*

Rezim internasional dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan jika harus bernegosiasi atau menjalin hubungan bilateral satu per satu. Dengan mengadopsi rezim tertentu, biaya yang dikeluarkan suatu negara menjadi relatif lebih ringan dalam menjalin kerjasama dengan aktor lain. Rezim tersebut menjadi efektif karena memiliki seperangkat aturan dan prinsip yang ajeg, sehingga tidak perlu melakukan negosiasi baru setiap kali muncul perkara baru²³.

c. *Problems of Uncertainty*

Dalam institusi, beberapa negosiasi yang bersifat mutualisme dapat jadi tidak terlaksana karena berada dalam kondisi yang tidak pasti. Sumber ketidakpastian tersebut yang paling khusus adalah *asymmetrical information*, *moral hazard*, dan *irresponsibility*. Informasi asimetris merupakan kondisi ketika suatu aktor mungkin memiliki informasi atau pengetahuan yang lebih dari aktor lain mengenai suatu situasi. Masalah ini timbul apabila terdapat aktor yang

²² *Ibid.* Hal 88-89

²³ *Ibid.* Hal 90-92

berperilaku tidak jujur. Kondisi tersebut memungkinkan manipulasi hubungan atau membuat kesepakatan yang menipu²⁴.

Kekacauan moral muncul karena suatu kesepakatan memiliki kemungkinan untuk mengubah motivasi suatu aktor sedemikian rupa sehingga mendorong untuk tidak bekerjasama. Beberapa aktor menjadi tidak bertanggung jawab dengan membuat komitmen yang mereka tidak mampu lakukan. Para aktor menyetujui suatu kesepakatan yang mereka ingin jaga, dengan berasumsi bahwa lingkungan internasional berada dalam kondisi yang baik. Ketika bencana datang, mereka tidak mampu menjaga komitmen yang telah disepakati tersebut.

Institusi internasional membantu negara-negara dalam menghadapi masalah-masalah di atas. Prinsip dan aturan yang terkandung dalam suatu institusi mengurangi harapan perilaku, meminimalkan ketidakpastian, serta informasi menjadi lebih terbuka, oleh karena itu penyebaran informasi juga semakin merata. Dengan demikian, institusi internasional menjadi berguna bagi pemerintah suatu negara karena membantu negara dalam memperoleh objektifnya, yang tidak akan tercapai apabila tanpa melalui institusi.

Dalam kaca mata institusionalisme neoliberal, bisa dipahami bahwa dalam melakukan pencapaian pembangunan guna memenuhi target MDGs merupakan suatu hal yang bisa dicapai dengan adanya suatu kerjasama dalam institusi seperti melalui kerjasama global. Melalui pengembangan kerjasama global ini tentu terdapat kesamaan kepentingan yakni sama-sama menginginkan suatu

²⁴ *Ibid.* Hal 93-96

pembangunan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Hal ini bisa diterapkan oleh Indonesia pada masa pemerintahan SBY dalam melakukan pembangunan guna mencapai target MDGs yakni menurunkan tingkat kemiskinan. Indonesia bisa mengembangkan kerjasama globalnya melalui forum internasional, berbagai organisasi multilateral, mitrabilateral dan sektor swasta. Selain adanya kesamaan kepentingan faktor *institutional degree* yakni kepercayaan yang dimiliki antara mitra mampu bersinergi guna mencapai suatu kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain.

Didalam institusionalisme neoliberal bisa dilihat bahwa dengan adanya institusi ini dapat membantu Indonesia dalam menghadapi masalah-masalah pembangunan yang dalam hal ini adalah masalah pembangunan di MDGs yakni yang disebut sebagai *problem of uncertainty*.

3. *World System Theory*.

World System Theory atau teori system dunia merupakan pemikiran dari Immanuel Wallerstein, Wallerstein melihat bahwa pengorganisasian kapitalisme sebagai struktur ekonomi yang semakin solid, menjadi sistem dunia (*world system*). Wallerstein membayangkan sistem dunia sebagai sistem ekonomi global yang memberi kemungkinan sirkulasi aktor dan pusat pertumbuhan ekonomi.

World System Theory (WST) ini merupakan kritikan terhadap teori *Dependencia* yang menyatakan bahwa negara akan selamanya menjadi negara *periphery* atau tetap menjadi negara *core*. Namun berbeda dengan WST

dimana teori ini menyatakan bahwa adanya konsep kenaikan kelas. Negara pinggiran atau *pheryperi*, jika berhasil terlibat dalam pembagian kerja, akan mengalami kenaikan kelas menjadi negara *semi-pheriperi*, dan bukan tidak mungkin akan menjadi negara *center* atau pusat (*core*). Seperti yang sedang berlangsung saat ini dalam pembangunan kapitalis di negara-negara Asia seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan dan China dimana integrasi dengan rezim pasar global tidak selalu harus berakhir dengan eksploitasi, dominasi dan juga dependensi negara pasca-kolonial atas negara maju. Menurut Immanuel Wallestein dinamika sistem dunia, yakni kapitalisme global, selalu memberikan peluang-peluang bagi negara pinggir untuk bisa memperbaiki diri/naik kelas/turun kelas²⁵.

Dilihat dari teori sistem dunia memungkinkan Indonesia menjadi negara *semi-pheryphery* karena upaya yang dilakukannya yakni mengembangkan kemitraan global yang menguntungkan Indonesia yang mampu juga dalam mencapai target-target pembangunan MDGs.

²⁵ Ade Marup, Materi Kuliah Teori Pembangunan, "*Teori Sistem Dunia*", Slide 16. Penulis merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Hipotesis

Pada masa pemerintahan SBY, langkah Indonesia dalam mengembangkan kerjasama global dalam mencapai pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) dilakukan melalui dua cara, yakni :

1. Pada level internasional, Indonesia pada masa pemerintahan SBY dengan *soft powernya* mampu mengembangkan kerjasama global baik bilateral, multilateral, maupun dengan pihak swasta. Melalui peran serta dalam institusi internasional yang ada, Indonesia berpartisipasi aktif dalam menjalin kerjasama global yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan pencapaian pembangunan MDGs.
2. Upaya Indonesia dengan mengembangkan kerjasama globalnya dalam mencapai pembangunan MDGs mampu merubah keadaan Indonesia dari negara pinggiran kenegara semi-pinggiran.

H. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini adalah sekitar tahun 2004 sampai 2014 yakni dimana tahun pertama SBY menjabat sebagai presiden dan sampai pada akhir SBY menjabat sebagai presiden dalam hal ini pada periode I (2004-2009) dan II (2009-2014) SBY menjabat sebagai presiden. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan tahun-tahun sebelumnya dibahas dalam penelitian ini.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang mengutamakan data yang berupa pernyataan, statement yang bersifat kualitatif, bukan kuantitatif untuk dijadikan variabel pemahaman. Teknik analisisnya secara deskripsi eksplanatoris yaitu menjelaskan dengan menggambarkan suatu fenomena dengan fakta-fakta yang aktual. Kemudian memberikan penjelasan yang obyektif menurut data dan fakta yang tersedia, menghubungkan antar faktor sebagai unit analisis, dan menginterpretasikannya untuk mencapai kesimpulan. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka (*library reaserch*) dengan bahan pustaka seperti buku, jurnal, bulletin, surat kabar, materi kuliah, media internet, serta segala dokumen tertulis yang memiliki data yang tepat dijadikan sebagai referensi studi kepustakaan.

J. Sistematika Penulisan

Bab I

Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pembuka yang didalamnya berisikan tentang alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka konseptual, hipotesis, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Hal tersebut dikarenakan yang tertulis dalam bab ini merupakan dasar atau kerangka pemikiran untuk melakukan langkah selanjutnya dalam penulisan skripsi ini.

Bab II

Pembangunan di Indonesia Pada Masa Pemerintahan SBY

Dalam bab ini berisi tentang pengertian pembangunan dan masalah pembangunan di Indonesia pada masa pemerintahan SBY seperti pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan.

Bab III

Millenium Development Goals(MDGs) Sebagai Instrumen Baru Pembangunan Indonesia

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang MDGs serta sejarahnya serta akan dibahas juga mengenai MDGs di Indonesia dari mulai SBY menjabat sebagai presiden di periode I (2004-2009) sampai pada periode II (2009-2014).

BabIV

Indonesia dan Kerjasama Global dalam Pencapaian Pembangunan MDGs

Bab ini akan membahas tentang langkah Indonesia dalam mengembangkan kerjasama global dalam pencapaian pembangunan MDGs seperti pada forum-forum internasional dan berbagai organisasi multilateral.

Bab V

Kesimpulan

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari bab keseluruhan